

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kedudukan Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah kedudukan daerah istimewa yogyakarta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pemberian keistimewaan DIY menurut prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Socio-Legal Research*, yaitu dengan menggabungkan antara metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode pendekatan yang bersifat empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka disimpulkan bahwa secara *de facto* pengakuan status keistimewaan Yogyakarta sudah diakui sejak Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945 dan secara *de jure* kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa baru terjadi pada saat UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950, pemberian keistimewaan DIY telah sesuai dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan ciri khas dari model negara kesatuan yang kita anut, serta penetapan jabatan Gubernur DIY oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Wakil Gubernur DIY oleh Paku Alam yang bertahta sudah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat (sistem demokrasi).

Implikasi teoritis penelitian ini agar memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya pemahaman teoritis tentang kedudukan DIY di Indonesia, sedangkan implikasi praktisnya diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

**Kata Kunci:** Keistimewaan, Penetapan, dan Kedaulatan rakyat.

## **ABSTRACT**

This thesis entitled "The Status of Special Region in the Republic of Indonesia Under Act No. 13 of 2012 Juncto Act No. 23 of 2014 in Special Region Yogyakarta." Research problems in this study are: (1) How is the historical position of special region Yogyakarta in the regulation of legislation in Indonesia, (2) How is granting the privileges for a certain region according to Republic of Indonesia Principles, (3) How is the mechanism for filling the positions of Governor and Vice Governor in special region Yogyakarta based on People Sovereignty (democracy). The method used in this study is the approach of Socio-Legal Research which is by combining both normative and empirical approach.

Based on the result of this study and the data analysis, it was concluded that *de facto* recognition of the status privilege of Yogyakarta has been recognized since Sultan Hamengku Bowono IX and Paku Alam VIII issued a mandate on September 5<sup>th</sup> and *de jure* position of Yogyakarta as a special region occurred when Act no. 3 1950 about the establishment of special region Yogyakarta was set on March 3<sup>rd</sup> 1950. Granting privileges to special region Yogyakarta is correspond to Republic of Indonesia concept which has characteristic from unity state that we have adopted, as well as the position decree of Governor in Yogyakarta by Sultan Hamengku Buwono XI and Vice Governor VIII in Yogyakarta by Paku Alam is correspond to People Sovereignty (democracy).

The theoretical implications of this study is to give a contribution to the science of law in the development of constitutional law, particularly the theoretical understanding of special region Yogyakarta in Indonesia, while the practical implications are expected to provide input as well as additional knowledge for all those who are willing to accept and for the parties concerned with problems examined in particular for the Government and Parliament, as well as beneficial to the parties interested in the same issues.

***Keywords: Features, Determination, and Sovereignty of the people.***